



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YANI IRAWATI
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 444723

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.470.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 513 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 810.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 1900, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH JEEP Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOTOR, -- SEPEDA MOTOR Tahun 1900, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
4. MOTOR, -- SEPEDA MOTOR Tahun 1900, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
5. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 91.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	25.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	50.000.000
Sub Total	Rp.	2.446.500.000
III. HUTANG	Rp.	150.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.296.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.